

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Rifian Handi, Sujianto dan Zaili Rusli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of the Family Planning Village Program. Increasing population growth has led the Kampar District Government to run a family planning village program, one of which is in Kampar Kiri Hulu Subdistrict, Tanjung Belit Selatan Village. The Kampar Regency Government, Riau Province established Tanjung Belit Selatan Village as one of the Family Planning (KB) villages. KB Village Services will also be integrated with other sectors, such as education, health, and social. But the phenomenon that occurs is that this program has not run as expected, many people do not know the benefits of the KB village, then the lack of human resources that run it. Then the obstacle is that the local regional government cannot unite other related agencies, for example the population office and the health department. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Family Planning Village Program in Tanjung Belit Selatan Village, Kampar Kiri Hulu District. In this study the authors used a descriptive qualitative research type. Primary data were obtained directly through interviews from the Kampar Kiri Hulu Sub-District Chief informant, PKB Coordinator, KB village cadre and Tanjung Belit Selatan village community. The results of this study indicate that the Implementation of the Family Planning Village Program in Tanjung Belit Selatan Village is going well, but changes must be made on the empowerment and training side as well as the socialization of KB family cadres as the spearhead in the distribution of information to the people of Tanjung Belit Selatan Village. Cadre, then the management needs information such as training and socialization specifically in the KB village program, the implementers are considered to need to master the existing technical instructions. In implementing the implementation, the KB Village Technical Guidelines are also very necessary, because with the standard, namely the operational guidelines (Implementation Guidelines), it is hoped that the activities in the KB village program will run well, therefore training must be carried out continuously and evenly.

Key words: Implementation, Family Planning, Cadres, Main Tasks and Functions.

Abstrak: Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat Pemerintahan Kabupaten Kampar menjalankan program kampung keluarga Berencana, salah satunya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Tanjung Belit Selatan. Pemerintahan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau menetapkan Desa Tanjung Belit Selatan sebagai salah satu kampung Keluarga Berencana (KB). Pelayanan Kampung KB juga akan terintegrasi dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Namun fenomena yang terjadi adalah program ini belum berjalan sesuai dengan harapan, banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat kampung KB, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang menjalankannya. Kemudian hambatannya adalah Pemerintah daerah setempat tidak bisa mempersatukan dinas-dinas terkait lain, misal dinas kependudukan dan dinas kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari imforman Camat Kampar Kiri Hulu, Koordinator PKB, Kader kampung KB dan masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan berjalan baik, namun harus dilakukan perubahan pada sisi pemberdayaan dan pelatihan serta sosialisasi kader kampung KB sebagai ujung tombak dalam pemerataan informasi kepada masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan. Kader, kemudian pengurus perlu adanya informasi seperti pelatihan dan sosialisasi secara khusus dalam program kampung KB ini, para pelaksana dianggap perlu menguasai petunjuk teknis yang ada, Dalam pelaksanaan implementasi, Juknis Kampung KB juga sangat diperlukan, karena dengan adanya standar, yakni Juklak (Petunjuk Pelaksanaan),

diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program kampung KB berjalan baik, maka dari itu pelatihan dilakukan harus berkesinambungan dan merata.

Kata Kunci : Implementasi, Keluarga Berencana, Kader, Tugas Pokok dan Fungsinya.

PENDAHULUAN

Kampung Keluarga Berencana adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga (RW), dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, yang di dalamnya terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung Keluarga Berencana direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan pada Kampung Keluarga Berencana.

Kampung Keluarga Berencana merupakan terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat dusun alias kampung. Kampung Keluarga Berencana memadukan konsep pembangunan terpadu bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan salah satu upaya program sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung Keluarga Berencana berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Keluarga Berencana sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.

Konsep Kampung Keluarga Berencana adalah miniatur pelaksanaan program Keluarga Berencana secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/kelurahan/ dusun/RW). Konsep Kampung Keluarga Berencana merupakan konsep terpadu program Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung Keluarga Berencana didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program Keluarga Ber-

encana. Keegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggungjawab masyarakat, yakni melalui upaya menjadikan Kampung Keluarga Berencana sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Partisipasi berbagai instansi dalam Kampung Keluarga Berencana sangat penting sehingga pelayanan prima dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat.

Kampung Keluarga Berencana diharapkan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan dalam mewujudkan Agenda Prioritas 5 (lima) dari 9 agenda prioritas pemerintahan periode 2015 – 2019 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Secara umum, Kampung Keluarga Berencana ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Secara khusus, kampung Keluarga Berencana ini dibentuk selain meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non Kementerian dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sector terkait, juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan

Program Kampung Keluarga Berencana tersebut terus dikembangkan di setiap

wilayah di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten/Kota di Riau. Tepatnya di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah terpilih salah satu Kampung yang bergelar Pulau Pencong Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kampung Keluarga Berencana tersebut diresmikan pada tanggal 14 Juli 2017, terpilih menjadi Kampung Keluarga Berencana karena terbilang kampung yang tertinggal dan tingkat kesejahteraan warganya yang masih rendah, pemberdayaannya masing-masing minim, namun terlihat dominan dalam gotong royong pada tatanan masyarakatnya. Kampung Keluarga Berencana ini yang diharapkan dapat menjadi kampung percontohan atau ikon bagi kampung-kampung yang lainnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Abdul Wahab, 2005).

Pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan - kebijakan akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan secara menyeluruh. Beberapa tahun berjalannya Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini, partisipasi warga untuk menjadi peserta aktif Kampung Keluarga Berencana (KB) masih rendah dibandingkan dengan desa lain yang tidak termasuk dalam program Kampung Keluarga Berencana, sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga proses administratif tidak efisien dan data base sulit diakses, masih terbatas dari segi sumber daya manusia, partisipasi masyarakatnya belum maksimal, serta pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dalam controlling dan evaluating program menjadi bahan perbincangan peneliti dalam akses perjalanan untuk menuju ke hakekat Kampung Keluarga Berencana sesungguhnya.

METODE

Metode penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih dapat menjelaskan atau mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan tentang objek dan permasalahan yang diteliti sebagaimana gambaran tentang implementasi Program Kampung KB di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Untuk mendukung penelitian ini penulis mengelompokkan dalam jenis data yang sesuai dilapangan, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui tahap observasi dan wawancara yang dilengkapi dengan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari objek peneliti yang berasal dari literatur yang tersedia baik dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, serta sumber-sumber ilmiah yang ada.

HASIL

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit

Selatan berjalan baik, namun harus dilakukan perubahan pada sisi pemberdayaan dan pelatihan serta sosialisasi kader kampung KB sebagai ujung tombak dalam pemerataan informasi kepada masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan. Kader, kemudian pengurus perlu adanya informasi seperti pelatihan dan sosialisasi secara khusus dalam program kampung KB ini, para pelaksana dianggap perlu menguasai petunjuk teknis yang ada. Dalam pelaksanaan implementasi, Juknis Kampung KB juga sangat diperlukan, karena dengan adanya standar, yakni Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam program kampung KB berjalan baik, maka dari itu pelatihan dilakukan harus berkesinambungan dan merata.

PEMBAHASAN

Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kampung Keluarga Berencana

1. Komunikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti telah menganalisa terkait dengan komunikasi yang telah disampaikan yang berhubungan dengan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, telah dilaksanakan dan berupaya sebaik mungkin dalam penyampaian informasi dari program tersebut kepada Kader, TOGA, TOMA, dan juga SKPD terkait. Penyampaian informasi tersebut berupa sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar para pihak yang terkait atau implementor program Kampung Keluarga Berencana dapat secara cermat mengetahui, memahami apa yang menjadi tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan, dan juga sasaran dari program tersebut. Sosialisasi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu diantaranya pembuatan papan nama dan juga memanfaatkan media cetak yaitu banner, balih, dll. Sosialisasi berbentuk lain yaitu penyuluhan secara langsung terkait program Kampung Keluarga Berencana. Begitu pula pernyataan yang telah diberikan oleh masyarakat yang mana menyatakan bahwa

mereka mendapatkan undangan sosialisasi di balai Desa Tanjung Belit Selatan, dimana sosialisasi tersebut menjelaskan akan diadakannya program Kampung Keluarga Berencana. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi atau transmisi dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana telah berjalan dengan cukup baik, mengingat bahwa koordinasi antara implementor dan juga sasaran kegiatan sudah mendapatkan informasi tentang Kampung Keluarga Berencana.

Sementara untuk kejelasan dari informasi terkait pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana yang telah disampaikan oleh pihak DPPKBP3A Kabupaten Kampar sudah baik dan jelas. Hal tersebut dibenarkan dengan adanya pernyataan dari Kepala Bidang Keluarga Berencana di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar. Kejelasan informasi yang didapat dari Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar tersebut kemudian pihak PLKB pun dapat melaksanakan Program Kampung Keluarga Berencana itu sesuai dengan prosedur dan juga berpedoman pada buku petunjuk teknis Kampung Keluarga Berencana. Beralih dari hak tersebut bahwa dari jajaran advokasi sudah menyampaikan informasi dengan jelas, tetapi masalah yang justru muncul yaitu pemahan yang ditangkap oleh masyarakat terkait Kampung Keluarga Berencana sebagian besar masih kurang. Terbukti bahwa peserta yang ikut serta mengikuti kegiatan tersebut masih minim, meski peserta bertambah, itu pun hanya beberapa saja dan tidak secara langsung dengan jumlah yang tinggi.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki tiga sub indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana, diantaranya yaitu: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan dari suatu program. Dalam kegiatan kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung

Belit Selatan ini untuk sumber daya manusianya tidak memiliki kekurangan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nurhayati bahwa para pelaksana Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan tidak merasa kekurangan dari sisi sumber daya manusianya, karena dengan adanya 25 Kader yang ikut serta dan juga dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat serta dari perangkat desa sudah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang melibatkan persoalan tentang dana atau modal awal yang memang sudah direncanakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan dialokasikan dalam suatu kegiatan. Hasil dari penelitian terkait anggaran yang dipergunakan sudah mampu mencukupi untuk menutupi kebutuhan dana yang ada selama proses program Kampung Keluarga Berencana berjalan. Untuk anggaran itu sendiri berasal dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD, dan juga dari ADD. Untuk pencaangan yaitu berupa pembangunan Tugu Kampung Keluarga Berencana dan pembuaatan pemasangan papan nama dan keperluan sosialisasi pada awalnya dibiayai oleh BKKBN. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu dalam kebutuhan konsumsi, penyuluhan, serta uang transport bagi para kader berasal dari anggaran BKKBN Pusat dan Propinsi, APBD dan juga dibantu dengan ADD.

Sumber daya fasilitas disini memiliki peran penting dalam mendukung serta menunjang berjalannya Program Kampung Keluarga Berencana. Fasilitas disini berupa sarana dan prasarana yang memang layak diadakan untuk menunjang keberhasilan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Hal tersebut bahwasannya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam mendukung proses pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berencana, ini adalah salah satunya yaitu tempat. Tempat yang dipergunakan selama kegiatan kampung Keluarag Berencana ber-

langsung yaitu bertempat pada rumah-rumah atau kediaman salah seorang warga yang bersedia, terkadang juga saat ada penyuluhan maka tempat yang digunakan yaitu berada di balai Desa Tanjung Belit Selatan. Tidak hanya tempat saja, sarana dan prasarana lain juga diberikan seperti buku penyuluhan yang diperuntukkan kepada ibu-ibu kader untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi sendiri terbentuk dari dua sub indikator yaitu sub indikator sikap dan juga sub indikator insentif yang di berikan. Sub indikator sikap yang bersifat positif maka akan terjadinya kegiatan yang memiliki koordinasi serta kesinambungan antara para implementor dengan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa sikap yang diberikan oleh para implementor yaitu Kader didalam kegiatan program kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Selaku Ketua dan kepengurusan Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Kampar Kiri Hulu, beliau mengatakan bahwa dari pihak implementor sendiri menerima sangat baik dengan adanya program Kampung Keluarga Berencana ini, menurut beliau dengan adanya Kampung Keluarga Berencana ini nantinya akan mensejahterakan masyarakat Desa Tanjung Belit Selatan tersebut, dan jika program ini berhasil maka hal tersebut juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Program Kampung Keluarga Berencana ini. Namun ada beberapa kendala terkait sikap yang diberikan oleh para kader, yaitu kurangnya pendekatan secara personal pada peserta kampung Keluarga Berencana dengan masyarakat. Hal inilah yang terjadi meski program ini sudah berjalan di Desa Tanjung Belit Selatan. Kurangnya pendekatan ini megakibatkan kurang responnya masyarakat terhadap program Kampung Keluarga Berencana.

Sub indikator selanjutnya yaitu adalah insentif yang telah diterima dan diberikan. Diperlukan adanya insentif yang cukup layak

diberikan kepada pelaksana kegiatan. Insentif sendiri merupakan bentuk menghargai dengan apa yang telah dilakukan. Insentif di dalam kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sendiri sudah cukup baik. Insentif yang diterima oleh kader berasal dari pertemuan kegiatan kampung Keluarga Berencana yang sudah ditetapkan dan disesuaikan juknis program kampung keluarga berencana.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa disposisi yang diberikan belum tercapai secara maksimal, hal tersebut dikarenakan dari kurangnya kesadaran sikap dari para kader yang acuh terhadap tugas yang telah diberikan. Pendekatan atau kunjungan ke rumah warga dirasa kurang, sehingga masyarakat kurang mengenal dan mengetahui jelas program kampung keluarga berencana. Sehingga hal tersebut berakibatkan masih adanya masyarakat yang mengabaikan pula program Kampung KB tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua sub indikator dalam struktur birokrasi, yang pertama yaitu Standart Operasional Prosedur (SOP). SOP sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu program. SOP digunakan sebagai acuan langkah-langkah atau tahapan dari tindakan yang akan diambil selama proses pelaksanaan dari suatu kegiatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, SOP dari Kampung Keluarga Berencana di Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sudah cukup baik, SOP yang digunakan yaitu berupa buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana, mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan dan juga evaluasi program semua mengikuti buku petunjuk teknis tersebut.

Sub indikator fragmentasi merupakan pembagian tugas, kewajiban, serta wewenang yang terkait dengan suatu program. Dalam hal ini, fragmentasi dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan sudah dikatakan baik. Segala tugas-tugas dan

wewenang yang telah diberikan juga dijalankan dengan sesuai prosedur yang ada. Pelaksanaan dari pihak Dinas DPPKBP3A Kampar, PLKB Kecamatan Kampar Kiri Hulu, serta para Kader Kampung Keluarga Berencana sudah melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana. Menurut hasil penelitian yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Tanjung Belit Selatan selaku Ketua Pokja Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Kampar Kiri Hulu, bahwa mereka tidak hanya melaksanakan kegiatan begitu saja, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan yaitu berupa laporan hasil dari kegiatan Kampung Keluarga Berencana yang diberikan setiap satu bulan sekali, dan juga ada tahap evaluasi yang mana dilaksanakan pada akhir tahun.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terkait dengan struktur birokrasinya, Program Kampung Keluarga Berencana ini tidak mengalami masalah, dan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari standart pelaksanaan yang dijalankan sudah jelas dan sesuai dengan apa yang terdapat pada pedoman yang di pegang yaitu buku petunjuk teknis pelaksanaan Kampung Keluarga Berencana. Sementara fragmentasi atau pembagian tugas serta wewenangnya juga baik, karena para implementor pun menjalankan tugas mereka sesuai peran masing-masing sebaik mungkin.

Merujuk pada seluruh indikator diatas bahwa semua jajaran baik pelaksana dan juga sasaran kegiatan terkait informasi yang diberikan sudah sampai dan cukup jelas. Sumberdaya yang ada pada kegiatan kampung Keluarga Berencana tersebut juga sudah memadai, sementara untuk Disposisi yang diberikan sangat direspon dengan sangat baik, walaupun dari elemen masyarakatnya sendiri yang kurang mau menanggapinya atau kurangnya kesadaran mereka. Dan yang terakhir dilihat dari struktur organisasi, program Kampung Keluarga Berencana ini sudah dijalankan sesuai dengan pedoman dari buku petunjuk teknis Kampung Keluarga Berencana, serta tugas yang diberikan pun sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang

ada, kemudian di pertanggungjawabkan dengan berupa laporan pada setiap satu bulan sekali.

SIMPULAN

Implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar telah dideskripsikan dengan menggunakan teori model Implementasi yang di kemukakan oleh George Edward III yang mana terdapat empat indikator didalamnya, yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dijabaran dari Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan semua hasil dari penelitian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung Keluarga Berencana yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung Keluarga Berencana.

DAFTAR RUJUKAN

- Slameto. (2010). Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta.
- Afifiddin dan Saebani, Bani Ahmad. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; CV Pustaka Setia
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan, 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Juliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada

- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Sholid, dkk. Metodologi Penelitian. Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant, 2005. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. Analisis Kebijakan: dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.